



## Konvergensi Political Ecology dan Environmental Politics dalam Analisis Konflik Sumber Daya Alam: Studi Kasus Hutan Dongi-dongi Sulawesi Tengah

Yusril Perdiansyah Nur

Prodi Sosiologi Pedesaan, IPB University

\*Email : [yusrilperdiansyah@apps.ipb.ac.id](mailto:yusrilperdiansyah@apps.ipb.ac.id) ,

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kekuasaan, kebijakan konservasi, dan mobilisasi sosial dalam konflik perebutan akses dan penguasaan Hutan Dongi-dongi di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah, melalui perspektif Political Ecology dan Environmental Politics. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus eksploratif, melalui analisis pustaka, dokumentasi, dan interpretasi kritis terhadap teks akademik dan laporan lapangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik Dongi-dongi mencerminkan ketimpangan relasi kuasa antara negara, lembaga konservasi, dan masyarakat lokal. Pendekatan Political Ecology mengungkap proses marginalisasi dan eksklusi ekologis, sementara Environmental Politics menjelaskan munculnya gerakan sosial ekologis sebagai respons terhadap ketidakadilan lingkungan. Studi ini menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan harus berangkat dari kolaborasi partisipatif dan pengakuan terhadap pengetahuan lokal.

**Kata kunci :** Ekologi Politik, Politik Lingkungan, Konflik Sumber Daya, & Keadilan Ekologis

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the dynamics of power, conservation policy, and social mobilization in the conflict over access and control of the Dongi-dongi Forest within the Lore Lindu National Park, Central Sulawesi, through the perspectives of Political Ecology and Environmental Politics. The research employs a qualitative exploratory case study approach, using literature analysis, document review, and critical interpretation of academic texts and field reports. The findings reveal that the Dongi-dongi conflict reflects unequal power relations between the state, conservation institutions, and local communities. The Political Ecology framework exposes the*

*processes of marginalization and ecological exclusion, while Environmental Politics explains the emergence of socio-ecological movements as responses to environmental injustice. This study concludes that equitable natural resource governance requires participatory collaboration and recognition of local knowledge as the foundation for sustainable ecological transformation.*

**Keywords :** *political ecology, environmental politics, resource conflict, environmental justice*

## PENDAHULUAN

Kajian tentang ekologi politik merupakan salah satu upaya paling penting dalam memahami hubungan kompleks antara kekuasaan, politik, dan lingkungan. Disiplin ini lahir dari kegelisahan terhadap pendekatan ekologi konvensional yang cenderung memisahkan alam dari masyarakat, serta mengabaikan dimensi politik dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam *Routledge Handbook of Political Ecology*, Gavin Bridge, James McCarthy, dan Tom Perreault menjelaskan bahwa ekologi politik berkembang sebagai bidang kajian yang berupaya memahami “tubuh pengetahuan dan praktik yang terus tumbuh dan berkembang” dalam menjembatani antara sains lingkungan dan teori sosial kritis (Peet, Robbins, & Watts, 2011).

Mereka menegaskan bahwa mitos asal-usul ekologi politik sering kali dikaitkan dengan awal tahun 1980-an, terutama dengan tradisi *cultural ecology* dan *agrarian political ecology* yang dirumuskan oleh para pelopor seperti Piers Blaikie, Harold Brookfield, dan Michael Watts melalui karya-karya klasik mereka, seperti *The Political Economy of Soil Erosion in Developing Countries* (Blaikie, 1985) dan *Land Degradation and Society* (Blaikie & Brookfield, 1987). Melalui karya-karya ini, mereka berupaya menyingkap hubungan antara kekuasaan politik, kebijakan pembangunan, dan degradasi lingkungan di dunia berkembang. Meski cakupan awalnya masih sempit dan cenderung terfokus pada isu-isu pedesaan dan agraria, karya-karya tersebut tetap menjadi fondasi penting dalam pembentukan kerangka konseptual ekologi politik (Peet et al., 2011; Perreault, Bridge, & McCarthy, 2015).

Menurut Perreault dkk., perkembangan ekologi politik tidak dapat dilepaskan dari dialognya dengan disiplin ilmu lain yang berfokus pada studi alam dan masyarakat. Ekologi politik tumbuh beriringan dengan bidang kajian seperti geografi lingkungan, sejarah lingkungan, ekologi budaya, studi bahaya dan kerentanan, sosiologi lingkungan, antropologi ekologi, serta ekonomi ekologi. Semua bidang tersebut memiliki titik temu dalam upaya memahami bagaimana manusia membentuk dan dibentuk oleh sistem ekologis, namun ekologi politik memberikan penekanan yang lebih eksplisit pada dimensi kekuasaan dan

ketimpangan sosial yang melingkupi relasi manusia-lingkungan (Perreault et al., 2015: 4).

Salah satu kontribusi penting dari ekologi politik adalah penekanan pada geografi politik lingkungan yakni pemahaman bahwa dinamika ekologi tidak bisa dilepaskan dari konteks spasial dan relasi kuasa yang beroperasi di dalamnya. Setiap wilayah memiliki konfigurasi politik, ekonomi, dan kultural yang berbeda, sehingga bentuk dan arah praktik ekologi politik juga berbeda-beda di setiap tempat. Di Amerika Utara, misalnya, ekologi politik berkembang menjadi arus utama dalam nature-society geography, sementara di Inggris dan Eropa daratan, bidang ini masih sering dipandang sebagai disiplin yang bersifat “radikal” di pinggiran arus utama akademik (Robbins, 2012).

Perbedaan status epistemologis dan institusional ini menimbulkan refleksi kritis di kalangan para ilmuwan: apa yang dipertaruhkan, secara intelektual dan politik, jika “kita semua kini adalah ahli ekologi politik”? Pertanyaan ini, sebagaimana dikemukakan oleh Perreault dkk., menandai munculnya kesadaran baru bahwa ekologi politik telah berkembang menjadi medan pengetahuan yang lintas batas, terbuka terhadap berbagai pendekatan teoretis, dan relevan dengan tantangan ekologis kontemporer mulai dari perubahan iklim, politik pangan, hingga keadilan lingkungan (Perreault et al., 2015: 4).

Lebih dari sekadar bidang akademik, ekologi politik adalah proyek intelektual dan politik yang menantang cara pandang dominan terhadap alam sebagai objek teknokratis yang netral. Ia memandang lingkungan sebagai arena konflik sosial, di mana keputusan ekologis selalu melibatkan perebutan kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan nilai-nilai budaya. Karena itu, perkembangan ekologi politik tidak hanya mencerminkan kemajuan teori sosial tentang alam dan masyarakat, tetapi juga menandakan hadirnya pendekatan kritis terhadap relasi kuasa dalam pembangunan dan konservasi.

Secara historis, hubungan antara manusia dan alam tidak pernah netral; selalu ada dimensi politik yang menentukan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dalam pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan inilah yang membedakan ekologi politik dari ekologi manusia konvensional, karena ia tidak hanya mempelajari sistem lingkungan, tetapi juga struktur sosial, kebijakan, dan ideologi yang memengaruhi sistem tersebut (Bryant & Bailey, 1997). Dengan demikian, ekologi politik tidak hanya mengkaji degradasi lingkungan, tetapi juga mengungkap struktur ketimpangan global dan lokal yang melatarbelaknginya.

Dalam konteks kontemporer, ekologi politik semakin relevan untuk menjawab tantangan global seperti krisis iklim, konflik agraria, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya air, tanah, dan energi. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih holistik dan kritis terhadap bagaimana kebijakan pembangunan, kapitalisme global, dan praktik negara memengaruhi keberlanjutan ekologi di berbagai skala. Oleh karena itu, memahami asal-usul dan perkembangan ekologi politik bukan hanya penting secara historis, tetapi juga secara epistemologis karena di dalamnya terkandung refleksi tentang bagaimana ilmu sosial dapat berkontribusi dalam memperjuangkan keadilan ekologis di era krisis lingkungan saat ini.

## **LANDASAN TEORITIS**

### **Paradigma Dasar dan Definisi Ekologi Politik**

Ekologi politik merupakan suatu pendekatan interdisipliner yang berupaya memahami bagaimana kekuasaan, ekonomi politik, dan relasi sosial membentuk dinamika lingkungan dan sumber daya alam. Pendekatan ini berangkat dari pandangan bahwa permasalahan lingkungan tidak dapat dijelaskan semata-mata melalui faktor ekologis atau teknis, tetapi harus dilihat sebagai hasil dari struktur sosial, politik, dan ekonomi yang lebih luas (Bryant & Bailey, 1997). Dengan demikian, ekologi politik menolak pemisahan antara alam dan masyarakat serta menegaskan bahwa lingkungan adalah arena politik di mana berbagai kepentingan dan kekuasaan saling berinteraksi.

Menurut Robbins (2012), ekologi politik dapat dipahami sebagai studi mengenai bagaimana kekuasaan memengaruhi akses, kontrol, dan distribusi sumber daya alam. Ia menyoroti bahwa degradasi lingkungan sering kali bukan akibat “kesalahan lokal” atau ketidaktahuan masyarakat, melainkan hasil dari kebijakan pembangunan, kapitalisme global, dan relasi ketimpangan struktural. Dengan menempatkan analisis kekuasaan sebagai inti, ekologi politik membuka ruang bagi kritik terhadap pendekatan teknokratis yang melihat lingkungan secara netral dan bebas nilai.

Pendekatan ini berakar pada pemikiran awal para pelopor seperti Piers Blaikie dan Harold Brookfield, yang menelusuri bagaimana kebijakan kolonial dan ekonomi global berkontribusi terhadap degradasi tanah di negara berkembang (*The Political Economy of Soil Erosion in Developing Countries*, 1985). Mereka menegaskan bahwa kerusakan lingkungan sering kali merupakan konsekuensi logis dari sistem ekonomi politik yang menempatkan keuntungan di atas keberlanjutan ekologi (Blaikie, 1985; Blaikie & Brookfield, 1987). Pandangan ini

menjadi tonggak penting bagi pergeseran dari ekologi manusia tradisional menuju pendekatan yang lebih kritis dan politis.

### **Dinamika Teoritis dan Evolusi Pendekatan**

Seiring perkembangan akademik, ekologi politik mengalami diversifikasi teori dan pendekatan. Peet, Robbins, dan Watts (2011) menyebut fenomena ini sebagai “global political ecology” suatu payung konseptual yang menggabungkan teori ekonomi politik, post-strukturalisme, dan ekologi kritis dalam memahami dinamika kekuasaan dalam konteks globalisasi. Dalam pandangan ini, lingkungan dipahami bukan sekadar sebagai latar fisik, tetapi sebagai produk sosial dan politik yang terbentuk melalui interaksi antara wacana, institusi, dan praktik ekonomi global.

Terdapat setidaknya tiga tradisi besar dalam perkembangan ekologi politik. Pertama, pendekatan materialis-struktural yang menekankan faktor ekonomi dan politik makro sebagai penyebab utama perubahan lingkungan. Tradisi ini berakar pada Marxian political economy dan teori ketergantungan, dengan fokus pada relasi pusat pinggiran dan eksploitasi sumber daya di negara dunia ketiga (Watts, 2000). Kedua, pendekatan poststrukturalis dan wacana yang berkembang pada 1990-an, menekankan bagaimana pengetahuan ilmiah, bahasa, dan narasi pembangunan membentuk pemahaman tentang “alam” dan “masyarakat.” Pendekatan ini banyak dipengaruhi oleh Foucault, Escobar, dan Agrawal, yang melihat bahwa “alam” sendiri merupakan konstruksi politik (Escobar, 1999). Ketiga, pendekatan aktor-lokal dan hibriditas, yang muncul dalam dua dekade terakhir, berfokus pada peran masyarakat lokal, gender, dan identitas dalam pengelolaan sumber daya. Pendekatan ini mencoba menjembatani antara struktur kekuasaan global dan praktik lokal melalui konsep environmental subjectivities dan community resilience (Agrawal, 2005; Rocheleau, Thomas-Slayter, & Wangari, 1996).

Diversifikasi ini menunjukkan bahwa ekologi politik bukanlah kerangka teori yang monolitik, melainkan bidang yang terus berkembang secara dialogis antara teori dan praktik. Sebagaimana dinyatakan oleh Perreault, Bridge, dan McCarthy (2015), setiap konteks lokal memiliki “geografi ekologi politiknya sendiri” yang memengaruhi arah perkembangan teori dan agenda penelitian. Dengan demikian, memahami ekologi politik memerlukan kesadaran terhadap pluralitas perspektif yang membentuknya.

## **Arah Baru Ekologi Politik: Global, dan Keadilan Lingkungan**

Perkembangan ekologi politik di abad ke-21 ditandai oleh perluasan fokus dan geografisnya. Dari awalnya berorientasi pada isu agraria dan pedesaan di dunia berkembang, kini ekologi politik telah mencakup isu-isu global seperti perubahan iklim, politik pangan, energi, air, urbanisasi, hingga bencana ekologis (Peet et al., 2011; Robbins, 2012). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah bagaimana kapitalisme global dan kebijakan neoliberal membentuk relasi baru antara masyarakat dan lingkungan.

Namun, bersamaan dengan globalisasi, muncul pula pendekatan ekologi politik lokal yang menekankan pentingnya konteks budaya, pengetahuan lokal, dan nilai-nilai komunitas. Pendekatan ini sering disebut *grassroots political ecology* (Bryant, 1998), di mana masyarakat lokal dilihat bukan sebagai korban pasif, tetapi sebagai agen yang memiliki kapasitas politik dan ekologis dalam mengelola lingkungannya. Dalam konteks Indonesia, misalnya, studi-studi tentang pengelolaan hutan adat, konflik agraria, dan resistensi masyarakat terhadap proyek ekstraktif telah memperlihatkan dinamika ekologi politik yang khas, di mana relasi antara negara, pasar, dan komunitas berlangsung secara asimetris namun kreatif (Li, 2014).

Arah baru ekologi politik juga ditandai oleh semakin kuatnya arus keadilan lingkungan (*environmental justice*), yang memperjuangkan hak kelompok marjinal terhadap sumber daya alam dan lingkungan yang sehat. Gerakan ini berakar dari teori keadilan sosial, feminisme ekologi, dan gerakan masyarakat adat, yang menolak ketimpangan distribusi risiko lingkungan. Pendekatan *environmental justice* memperluas cakupan ekologi politik dengan menghubungkan dimensi ekologis dengan hak asasi manusia dan keadilan sosial (Schlosberg, 2007).

Dengan demikian, ekologi politik masa kini tidak lagi terbatas pada analisis konflik sumber daya, tetapi juga mencakup transformasi sosial menuju keadilan ekologis. Ia berfungsi sebagai lensa kritis untuk menafsirkan berbagai permasalahan lingkungan mulai dari privatisasi air, perubahan iklim, hingga ekspansi kapitalisme hijau dengan mempertanyakan siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung beban ekologis.

### **Sintesis Teoritis**

Secara teoretis, ekologi politik telah berevolusi dari studi tentang hubungan manusia-lingkungan menjadi kerangka analisis multidimensional yang melibatkan politik, ekonomi, budaya, dan etika. Ia menolak pandangan deterministik bahwa

lingkungan semata-mata membentuk masyarakat, melainkan menekankan bahwa lingkungan selalu merupakan hasil dari relasi kuasa yang historis dan dinamis. Dengan demikian, ekologi politik menjadi medan pertemuan antara teori sosial kritis dan praksis lingkungan, yang berupaya mewujudkan transformasi menuju keadilan sosial dan ekologis secara bersamaan (Robbins, 2012; Peet et al., 2011). Pendekatan ini terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran global akan krisis iklim, ketimpangan sumber daya, dan perlawanan masyarakat terhadap dominasi korporasi transnasional. Dalam konteks inilah, ekologi politik tidak hanya menjadi alat analisis, tetapi juga menjadi proyek etis dan politis dalam memperjuangkan masa depan yang berkelanjutan, adil, dan inklusif bagi seluruh komunitas manusia dan non-manusia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Menguak Makna Ekologi Politik**

Ekologi politik pada dasarnya merupakan sebuah proyek epistemologis yang berupaya membongkar dan menggugat “kebenaran” yang tampak mapan tentang hubungan antara manusia dan lingkungan alamnya. Ia tidak hanya berfungsi sebagai bidang kajian empiris, tetapi juga sebagai gerakan intelektual untuk menantang narasi-narasi dominan yang selama ini menjelaskan permasalahan lingkungan secara simplistik. Dalam pandangan Routledge Handbook of Political Ecology, Peet, Robbins, dan Watts menegaskan bahwa ekologi politik dirancang untuk “menghancurkan kenyamanan epistemik” dalam pemahaman masyarakat terhadap alam dan membuka ruang bagi kritik terhadap ideologi yang melandasi pengelolaan sumber daya (Perreault, Bridge, & McCarthy, 2015: 5).

Pada masa awal perkembangannya, karya-karya akademik dalam ekologi politik berfokus pada dekonstruksi penjelasan arus utama mengenai fenomena lingkungan di berbagai wilayah dunia. Misalnya, studi mengenai kelaparan di Nigeria, erosi tanah di Nepal, dan deforestasi di Brasil, yang sebelumnya dijelaskan sebagai akibat dari overpopulasi, praktik pengelolaan lahan yang keliru, atau ketidaktahuan masyarakat lokal. Pendekatan ekologi politik menolak penjelasan yang bersifat menyalahkan masyarakat tersebut, dan menggantinya dengan analisis yang menelusuri akar strukturalnya: ekonomi politik global, marginalisasi, warisan kapitalisme kolonial, serta kebijakan negara predator yang eksploitatif (Peet et al., 2011; Perreault et al., 2015).

Dengan arah berpikir seperti itu, ekologi politik tumbuh menjadi bidang

yang inklusif (katolik) baik dalam teori maupun metode. Ia tidak mengikatkan diri pada satu paradigma tunggal, melainkan bersifat terbuka terhadap pendekatan lintas disiplin yang relevan untuk memahami dinamika kekuasaan dan lingkungan di konteks tertentu. Seperti dinyatakan oleh Perreault dkk., secara teoretis, ekologi politik lebih berorientasi pada pemahaman rangkaian dinamika tertentu di tempat-tempat tertentu, dibandingkan sekadar menghasilkan teori universal dalam kerangka disipliner yang kaku (Perreault et al., 2015: 5). Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas epistemologis yang tinggi sebuah karakteristik penting yang menjadikan ekologi politik selalu relevan terhadap keragaman konteks sosial, politik, dan ekologis di seluruh dunia.

Secara metodologis, akar ekologi politik dapat ditelusuri hingga pada tradisi ekologi budaya (*cultural ecology*), yang menekankan pentingnya memahami relasi masyarakat dengan lingkungannya melalui konteks lokal dan sejarahnya. Namun, berbeda dengan ekologi budaya yang cenderung deskriptif, ekologi politik mengadopsi pendekatan kritis dengan menyoroti dimensi kekuasaan, ketimpangan ekonomi, dan politik representasi dalam dinamika lingkungan (Blaikie & Brookfield, 1987; Bryant & Bailey, 1997). Tidak mengherankan bila berbagai ilmuwan mendefinisikan ekologi politik dengan cara yang berbeda-beda. Neumann (2005) bahkan menegaskan bahwa ekologi politik menghindari definisi sederhana, karena kelenturannya justru menjadi kekuatannya. Bagi Blaikie dan Brookfield (1987: 17), ekologi politik merupakan “integrasi antara perhatian terhadap ekologi dan ekonomi politik yang didefinisikan secara luas.” Sementara Peet dan Watts (1996: 3) menyebutnya sebagai “wacana pembangunan” yang muncul sebagai kritik terhadap model pembangunan yang eksploitatif. Robbins (2004: 5) mendefinisikannya sebagai “alternatif eksplisit terhadap ekologi apolitis,” dan Enrique Leff menambahkan bahwa ia adalah “studi tentang hubungan kekuasaan dan konflik politik atas distribusi ekologi serta perjuangan sosial untuk mempertahankan alam” (Leff, n.d.: 5).

Definisi-definisi ini menunjukkan bahwa esensi ekologi politik bukan terletak pada objek studinya apakah itu pertanian, kehutanan, konservasi, atau tata kelola air melainkan pada cara pandanganya terhadap relasi kekuasaan dalam ruang ekologis. Bassett (1988: 455), misalnya, secara eksplisit merujuk pada karya Blaikie dan Brookfield dalam menjelaskan ekologi politik sebagai pendekatan yang menyoroti “keterkaitan antara ekologi pertanian, petani, negara, dan strategi akumulasi kelompok sosial yang berbeda.” Pandangan serupa dikembangkan oleh Bryant dan Bailey (1997), yang menegaskan bahwa ekologi politik berfungsi untuk mengungkap siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung beban dalam dinamika lingkungan global.



Oleh sebab itu, bagi Perreault dkk., batasan-batasan tematik dalam ekologi politik seperti apakah ia berfokus pada dunia agraria, sumber daya hutan, atau isu urban pada akhirnya bersifat semu dan tidak produktif. Sifat akademis yang dinamis, serta tuntutan untuk menjawab persoalan empiris yang terus berkembang, membuat ekologi politik senantiasa melampaui batas-batas disipliner dan metodologis. Ia terus memperluas ruang analisisnya ke wilayah baru, baik secara spasial, teoretis, maupun empiris, dari pedesaan ke perkotaan, dari Dunia Ketiga ke Dunia Pertama, dari ekonomi agraria ke kapitalisme digital (Perreault et al., 2015: 8). Dengan semangat yang sama, Perreault dkk. mengutip Karl Marx untuk menegaskan bahwa tujuan akhir ekologi politik bukanlah sekadar memahami dunia, melainkan mengubahnya (Perreault et al., 2015: 8). Dengan kata lain, ekologi politik tidak hanya menuntut pembacaan kritis atas realitas sosial-ekologis, tetapi juga mendorong keterlibatan politik dan praksis sosial dalam memperjuangkan keadilan lingkungan. Pendekatan ini tidak berhenti pada tataran analisis, tetapi berlanjut menjadi proyek emansipatoris yang berupaya mengoreksi ketimpangan struktural antara manusia dan alam.

### **Standing Position Keilmuan Ekologi Politik**

Secara epistemologis, ekologi politik menempati posisi yang unik di antara bidang-bidang keilmuan yang mengkaji hubungan antara manusia dan lingkungan. Ia bukan disiplin yang berdiri sendiri secara eksklusif, tetapi lebih tepat disebut sebagai ruang lintas ilmu yang dihuni bersama oleh berbagai cabang ilmu sosial dan humaniora. Seperti yang dijelaskan oleh Perreault, Bridge, dan McCarthy (2015: 8), posisi keilmuan ekologi politik beririsan dengan disiplin seperti antropologi lingkungan, sosiologi lingkungan, ekonomi ekologi, dan ekonomi lingkungan, yang semuanya berupaya memahami bagaimana masyarakat berelasi dengan dunia non-manusia. Melalui kerangka-kerangka pengetahuan ini, ekologi politik berkontribusi tidak hanya dalam menganalisis kondisi lingkungan saat ini, tetapi juga dalam membentuk masa depan ekologis yang lebih adil dan berkelanjutan.

Bidang ini juga berbagi medan intelektual dengan sejumlah domain interdisipliner dan terapan, seperti ilmu keberlanjutan (*sustainability science*), rural development studies, urban environmental planning, serta penelitian tentang bencana, perubahan iklim, dan mitigasi lingkungan (Perreault et al., 2015: 8). Dengan demikian, posisi keilmuan ekologi politik bersifat transdisipliner, menjembatani antara teori sosial, geografi, ekonomi, dan ekologi, serta membuka ruang dialog antara sains lingkungan dan politik kekuasaan.

Namun, yang membedakan ekologi politik dari bidang-bidang lain adalah posisi kritisnya terhadap wacana lingkungan arus utama. Ekologi politik secara eksplisit memosisikan dirinya sebagai “the other” yakni sebagai antitesis terhadap agenda pengelolaan lingkungan yang dikuasai oleh elit negara dan korporasi (Perreault et al., 2015: 9). Pendekatan ini menolak pandangan teknokratis yang memandang alam secara netral dan apolitis, dengan menunjukkan bahwa setiap cara “mengetahui alam” (ways of knowing nature) selalu membawa kepentingan politik tertentu. Dengan demikian, ekologi politik tidak hanya menganalisis kebijakan atau proses ekologis, tetapi juga mendekonstruksi pengetahuan itu sendiri siapa yang memproduksinya, untuk kepentingan siapa, dan dengan implikasi apa bagi masyarakat dan lingkungan.

Sikap kritis ini juga tampak dalam keterlibatan ekologi politik dengan ekonomi lingkungan dan ekonomi ekologi. Jika ekonomi lingkungan tradisional cenderung memandang sumber daya alam sebagai komoditas yang dapat dihitung dalam logika pasar, maka ekologi politik menolak pendekatan reduksionis tersebut. Ia mengajukan pertanyaan mendasar: bagaimana kekuasaan menentukan nilai suatu sumber daya, dan siapa yang diuntungkan atau dirugikan dalam proses tersebut? Melalui jarak kritis terhadap model pasar dan asumsi rasionalitas ekonomi, ekologi politik menegaskan dirinya sebagai alternatif epistemologis dan metodologis yang lebih reflektif terhadap realitas sosial-ekologis (Perreault et al., 2015: 9).

Dengan posisi demikian, ekologi politik tidak sekadar menambah “satu perspektif baru” terhadap isu lingkungan, melainkan mendefinisikan ulang cara ilmu sosial memahami alam. Ia menolak dikotomi tradisional antara nature dan society, serta menegaskan bahwa alam tidak dapat dipisahkan dari proses sosial dan politik yang membentuknya. Karena itu, batas-batas disiplin antara geografi, antropologi, dan ekonomi menjadi cair, bergeser menuju suatu bentuk epistemologi yang mengakui interdependensi antara pengetahuan, kekuasaan, dan lingkungan. Lebih lanjut, posisi keilmuan ekologi politik juga berinteraksi dengan kajian politik lingkungan (environmental politics) dan keadilan lingkungan (environmental justice). Dalam *The Routledge Handbook of Political Ecology*, Ryan Holifield membedah hubungan antara kedua ranah tersebut dengan menunjukkan bahwa keduanya memiliki fokus serupa yakni pada isu ketimpangan, marginalisasi, dan distribusi risiko ekologis namun berkembang secara terpisah karena perbedaan konteks geografis, teori, dan metodologi (Perreault et al., 2015: 15–16). Bila environmental justice banyak berakar dari gerakan sosial di Amerika Utara yang menentang ketidakadilan rasial dan ekonomi dalam polusi industri, maka political ecology lebih banyak berkembang dari tradisi analisis kritis di

Global South yang menyoroti hubungan antara kolonialisme, kapitalisme, dan degradasi lingkungan. Meski demikian, keduanya kini semakin konvergen dalam memperjuangkan keadilan sosial-ekologis dan demokratisasi pengelolaan sumber daya alam.

Perreault dkk. (2015: 16) juga menegaskan bahwa secara historis, akar keilmuan ekologi politik tertanam kuat dalam tradisi Marxis terutama dalam hal analisis relasi produksi, kelas, dan kapitalisme. Namun, perkembangan mutakhir menunjukkan adanya perluasan paradigma yang semakin inklusif terhadap perspektif feminis, pascakolonial, dan ekologi budaya. Pendekatan feminis, misalnya, menyoroti bagaimana relasi gender turut membentuk struktur kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya, sedangkan perspektif pascakolonial mengkaji bagaimana warisan kolonial masih memengaruhi kebijakan dan praktik konservasi di negara-negara Selatan (Rocheleau et al., 1996; Escobar, 1999). Integrasi berbagai perspektif ini memperkaya ekologi politik, menjadikannya arena teoritis yang terus bergerak, terbuka terhadap reinterpretasi, dan berorientasi pada transformasi sosial.

### **Environmental Politics**

Konsep politik lingkungan (environmental politics) memiliki keterkaitan yang erat dengan ekologi politik karena keduanya sama-sama berupaya memahami bagaimana kekuasaan, kebijakan, dan ideologi memengaruhi hubungan manusia dengan alam. Namun, politik lingkungan lebih menitikberatkan pada mobilisasi politik, proses kebijakan publik, dan perubahan wacana politik yang berkaitan dengan isu-isu ekologis. Dalam *The Routledge Handbook of Political Ecology*, Perreault, Bridge, dan McCarthy (2015: 571) menekankan bahwa politik lingkungan mengajukan pertanyaan fundamental: dengan cara apa dan mengapa individu atau kelompok melakukan mobilisasi politik atas nama alam? Pertanyaan-pertanyaan seperti siapa yang memiliki akses, kontrol, atau memperoleh manfaat dari lingkungan, serta bagaimana isu-isu lingkungan dipolitisasi atau didepolitisasi, menjadi inti dari penyelidikan politik lingkungan dalam kerangka ekologi politik itu sendiri.

Pendekatan ini mengakui bahwa lingkungan bukan sekadar latar bagi tindakan politik, tetapi juga objek politik itu sendiri, tempat beroperasinya relasi kuasa, kepentingan ekonomi, dan wacana ideologis. Proses politisasi lingkungan terjadi ketika isu ekologis diangkat menjadi bagian dari perdebatan publik, diartikulasikan melalui gerakan sosial, dan direspons melalui kebijakan negara.

Sebaliknya, depolitisasi terjadi ketika isu lingkungan direduksi menjadi persoalan teknis atau administratif, dilepaskan dari konteks ketimpangan sosial dan ekonomi yang melingkupinya (Perreault et al., 2015: 571). Dengan demikian, politik lingkungan berperan penting dalam menentukan bagaimana masyarakat memahami, menghargai, dan mengelola alam apakah sebagai sumber daya ekonomi, warisan moral, atau hak kolektif.

Dalam konteks politik kontemporer, isu lingkungan telah menjadi salah satu medan kontestasi yang paling menonjol. Pemerintah sering kali merespons krisis ekologis dengan pendekatan business as usual, di mana kebijakan lingkungan tidak benar-benar mengubah struktur ekonomi-politik yang menjadi akar permasalahan. Akibatnya, muncul pandangan sinis bahwa politik lingkungan tidak lebih dari sekadar simbolisme birokratis yang menutupi stagnasi sistemik (Carter, 2007: 3). Neil Carter, dalam karyanya *The Politics of the Environment: Ideas, Activism, Policy*, berpendapat bahwa politik lingkungan merupakan bidang kajian yang khas dan penting untuk dipelajari tidak hanya karena isunya, tetapi karena tantangan teoretis yang ditimbulkannya bagi disiplin politik (Carter, 2007: 3). Menurut Carter, politik lingkungan mencakup tiga komponen utama: a) kajian tentang teori dan ide politik yang berhubungan dengan lingkungan; b) analisis terhadap partai politik dan gerakan sosial yang memperjuangkan isu lingkungan; dan c) telaah atas proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik yang berdampak pada lingkungan di tingkat internasional, nasional, dan lokal. Melalui ketiga dimensi tersebut, politik lingkungan berfungsi sebagai wadah untuk memahami bagaimana ide-ide lingkungan dimasukkan ke dalam struktur kekuasaan formal, dan bagaimana gerakan sosial ekologis menantang status quo melalui strategi politik dan wacana alternatif.

Salah satu ciri khas politik lingkungan adalah fokusnya pada hubungan antara masyarakat manusia dan alam. Relasi ini mencakup beragam isu mulai dari konservasi alam liar, krisis iklim, politik pangan, hingga keadilan lingkungan (Carter, 2007: 3). Dalam perspektif ini, politik lingkungan bukan hanya tentang “menyelamatkan alam,” melainkan tentang mempertanyakan kembali cara masyarakat modern memahami dan mengatur hubungan mereka dengan dunia non-manusia.

Selain itu, politik lingkungan menantang paradigma politik tradisional. Ia menggugat konsep kekuasaan, keadilan, dan kebijakan yang sebelumnya berpusat pada kepentingan manusia, dengan memperluas cakupan moral dan normatifnya ke dalam ranah ekologis. Menurut Carter (2007: 8–9), politik lingkungan memaksa para filsuf politik untuk memperluas teori keadilan agar mencakup entitas non-

manusia dan generasi mendatang. Pertanyaan etis seperti “apakah alam memiliki hak?” atau “apakah manusia berutang kewajiban moral kepada generasi masa depan?” menjadi inti dari debat politik lingkungan kontemporer.

Lebih jauh, politik lingkungan juga memengaruhi dinamika ideologi modern. Ideologi-ideologi klasik seperti konservatisme, liberalisme, sosialisme, dan feminisme kini dihadapkan pada tantangan ekologis yang memaksa mereka untuk bertransformasi. Dari sinilah muncul konsep-konsep hibrida seperti ekososialisme dan ekofeminisme, yang menggabungkan kritik terhadap ketimpangan sosial dengan perjuangan ekologis. Gerakan politik hijau (Green Parties) di berbagai negara telah mengguncang struktur politik tradisional, menantang dominasi kepentingan industri dalam proses kebijakan, dan memunculkan bentuk baru partisipasi politik berbasis lingkungan (Carter, 2007: 8–9).

Paradigma pembangunan berkelanjutan yang muncul sejak 1980-an juga mengubah lanskap politik global. Ia menuntut pemerintah dan lembaga internasional untuk mempertimbangkan dimensi lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan. Dalam tataran hubungan internasional, paradigma ini menantang pendekatan realis tradisional yang menitikberatkan pada kepentingan negara dan kekuatan militer. Sebaliknya, politik lingkungan global menyoroti pentingnya kerja sama internasional dan tindakan kolektif untuk mengatasi ancaman lintas batas seperti perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati (Carter, 2007: 8–9).

### **Konvergensi antara Political Ecology dengan Enviromental Politics**

Perkembangan mutakhir dalam studi lingkungan menunjukkan semakin kaburnya batas antara dua bidang besar: Political Ecology dan Environmental Politics. Keduanya memiliki fokus analitis yang berbeda, tetapi berangkat dari kepedulian yang sama terhadap bagaimana kekuasaan, kebijakan, dan praktik sosial membentuk serta dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Konvergensi antara kedua bidang ini mencerminkan pergeseran paradigma besar dalam ilmu sosial lingkungan dari sekadar pemahaman teknis-ekologis menuju analisis kritis terhadap politik kekuasaan dalam pengelolaan alam (Perreault, Bridge, & McCarthy, 2015; Carter, 2007).

Sebagai bidang interdisipliner, Political Ecology berangkat dari kritik terhadap teori ekologi tradisional yang cenderung mengabaikan dimensi sosial, ekonomi, dan politik dalam studi lingkungan. Ekologi politik berargumen bahwa permasalahan ekologis tidak dapat dijelaskan hanya dengan variabel biogeofisik, melainkan harus dilihat sebagai produk dari kebijakan, struktur sosial, nilai budaya, dan relasi kekuasaan yang membentuk cara manusia mengelola sumber daya (Perreault et al., 2015).

Dengan menggabungkan teori ekonomi politik, geografi kritis, dan sosiologi lingkungan, Political Ecology memfokuskan kajian pada fenomena seperti konflik sumber daya alam, ketidakadilan lingkungan, perubahan iklim, dan dampak globalisasi terhadap komunitas lokal. Melalui analisis tersebut, bidang ini mengungkap bahwa degradasi lingkungan sering kali berakar pada ketimpangan struktural baik akibat kebijakan pembangunan, kapitalisme global, maupun warisan kolonialisme.

Pendekatan Political Ecology bersifat interdisipliner dan emansipatoris: ia tidak hanya menganalisis fenomena ekologis, tetapi juga menantang struktur sosial-politik yang menyebabkan ketimpangan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya alam. Dalam hal ini, tujuan ekologi politik bukan sekadar memahami dinamika sosial-lingkungan, melainkan juga mengembangkan strategi alternatif menuju pengelolaan sumber daya yang lebih adil dan berkelanjutan (Perreault et al., 2015: 5).

Sementara itu, Environmental Politics berfokus pada proses politik dan kebijakan publik yang berkaitan dengan lingkungan. Menurut Neil Carter dalam *The Politics of the Environment: Ideas, Activism, & Policy*, bidang ini mempelajari interaksi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan lingkungan (Carter, 2007: 3). Carter membagi politik lingkungan ke dalam tiga komponen utama: a) Kajian teori dan gagasan politik tentang lingkungan; b) Analisis partai politik dan gerakan sosial lingkungan; c) Evaluasi kebijakan publik dan implementasi kebijakan lingkungan di berbagai tingkat pemerintahan (Carter, 2007: 3).

Berbeda dengan Political Ecology yang banyak berangkat dari kritik struktural dan pendekatan kualitatif, Environmental Politics cenderung menggunakan kerangka institusional dan kebijakan publik untuk menjelaskan bagaimana keputusan politik memengaruhi kondisi lingkungan. Fokusnya bukan hanya pada struktur kekuasaan, tetapi juga pada mekanisme demokrasi, representasi politik, dan efektivitas kebijakan dalam mengatasi masalah ekologis. Dalam konteks global, Environmental Politics mempelajari peran lembaga

internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNFCCC, dan World Bank dalam membentuk tata kelola lingkungan global. Selain itu, bidang ini menyoroti peran aktivisme lingkungan, partai hijau, dan gerakan sosial transnasional yang menekan pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang lebih ekologis (Carter, 2007: 8–9).

Paradigma pembangunan berkelanjutan yang diadopsi banyak negara pada akhir abad ke-20 menjadi bukti bahwa politik lingkungan telah memengaruhi kebijakan global secara signifikan. Namun, kritik dari ekologi politik menunjukkan bahwa banyak kebijakan tersebut tetap mempertahankan logika ekonomi neoliberal yakni memonetisasi alam tanpa mengubah struktur ketimpangan yang mendasarinya (Perreault et al., 2015).

Meskipun Political Ecology dan Environmental Politics lahir dari tradisi keilmuan yang berbeda yang pertama dari geografi kritis dan ekonomi politik, dan yang kedua dari ilmu politik dan kebijakan publik keduanya kini semakin beririsan dalam beberapa hal penting. Pertama, keduanya sama-sama menolak pendekatan apolitis terhadap lingkungan. Jika Political Ecology menekankan dimensi ideologi dan ekonomi di balik degradasi ekologis, maka Environmental Politics menyoroti bagaimana proses kebijakan dan institusi formal dapat memperkuat atau mengoreksi ketimpangan tersebut (Carter, 2007; Perreault et al., 2015). Kedua, keduanya berbagi komitmen terhadap keadilan lingkungan (environmental justice). Political Ecology menganalisis akar ketidakadilan lingkungan melalui lensa struktural, sedangkan Environmental Politics mengupayakan perbaikan melalui reformasi kebijakan dan representasi politik. Konvergensi ini terlihat dalam munculnya pendekatan seperti green governance, climate justice movements, dan community-based environmental management, yang menggabungkan kritik struktural dengan strategi kebijakan konkret. Ketiga, keduanya memperluas horizon etika politik dengan memasukkan entitas non-manusia dan generasi masa depan dalam wacana keadilan. Dalam hal ini, ekologi politik memberi dasar filosofis dan ideologis bagi politik lingkungan, sementara politik lingkungan menyediakan ruang kelembagaan untuk menerapkan prinsip-prinsip etis tersebut dalam kebijakan publik (Carter, 2007: 8).

Meskipun terdapat titik temu yang kuat, perbedaan epistemologis dan metodologis tetap menjadi ciri khas masing-masing bidang. Political Ecology menggunakan pendekatan kualitatif dan interdisipliner, dengan penekanan pada narasi lokal, relasi kekuasaan, dan sejarah sosial. Sebaliknya, Environmental Politics banyak menggunakan analisis kebijakan publik dan teori politik normatif,

dengan fokus pada perumusan kebijakan, partisipasi, dan legitimasi politik (Perreault et al., 2015; Carter, 2007).

### **Studi Kasus: Perebutan Akses dan Penguasaan Hutan Dongi-dongi**

Kasus konflik penguasaan Hutan Dongi-dongi di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah, merepresentasikan bagaimana dinamika kekuasaan, kebijakan konservasi, dan mobilisasi sosial berinteraksi dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat dari empat desa Kamarora A, Kamarora B, Kadidia, dan Rahmat memilih menetap di kawasan hutan meski mengetahui statusnya sebagai kawasan lindung. Keputusan ini lahir dari keterdesakan ekonomi dan kegagalan kebijakan relokasi yang menyingkirkan mereka dari sumber penghidupan (Adiwibowo, 2008).

Konflik ini berakar pada relasi kuasa yang timpang antara negara dan masyarakat lokal. Negara, melalui kebijakan konservasi yang bersifat top-down, melakukan teritorialisasi atas ruang hidup masyarakat atas nama pelestarian alam. Namun, kebijakan tersebut justru menimbulkan marginalisasi sosial dan kehilangan akses ekonomi. Dalam perspektif ekologi politik, situasi ini mencerminkan “political ecology of exclusion” (Bryant & Bailey, 1997), di mana konservasi seringkali menjadi instrumen kekuasaan yang memperkuat ketimpangan. Gagalnya proyek konservasi partisipatif seperti Central Sulawesi Integrated Area Development and Conservation Project (CSIADCP) memperburuk kondisi masyarakat. Ketidadaan tindak lanjut pemerintah membuat warga frustrasi dan mendorong mereka melakukan mobilisasi sosial bersama LSM lokal seperti WALHI dan YBHR. Aksi demonstrasi besar pada Juni 2001 menandai pergeseran dari konflik ekonomi menuju gerakan sosial ekologis yang menuntut hak atas tanah dan partisipasi dalam pengelolaan sumber daya (Carter, 2007).

Dari perspektif Political Ecology, konflik ini memiliki tiga dimensi utama. Pertama, ia menunjukkan asimetris kekuasaan antara negara, lembaga konservasi, dan masyarakat adat. Kedua, konflik ini merefleksikan manifestasi ekonomi-politik global, di mana konservasi dijalankan dalam kerangka neoliberal yang menempatkan kepentingan ekologis global di atas kebutuhan lokal (Blaikie, 1985). Ketiga, konflik ini merupakan pertarungan makna diskursif konservasi, antara pengetahuan ilmiah negara dan pengetahuan lokal masyarakat (Peluso, 1992).

Mobilisasi masyarakat Dongi-dongi juga memperlihatkan irisan dengan Environmental Politics bagaimana masyarakat sipil menggunakan jalur politik dan advokasi untuk memperjuangkan keadilan ekologis dan sosial. Gerakan ini menegaskan bahwa perjuangan lingkungan bukan hanya persoalan ekologi, tetapi



juga politik representasi dan pengakuan terhadap hak masyarakat lokal

## **PENUTUP**

Kajian ini menegaskan bahwa pendekatan Ekologi Politik (Political Ecology) dan Politik Lingkungan (Environmental Politics) memberikan kerangka analisis yang saling melengkapi dalam memahami persoalan lingkungan yang kompleks, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Melalui studi kasus konflik perebutan akses dan penguasaan Hutan Dongi-dongi, tampak bahwa isu lingkungan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupinya.

Pendekatan ekologi politik membantu mengungkap relasi kuasa dan proses marginalisasi yang terjadi ketika kebijakan konservasi dijalankan secara top-down tanpa mempertimbangkan hak dan kebutuhan masyarakat lokal. Sebaliknya, politik lingkungan memberi pemahaman tentang mekanisme mobilisasi sosial dan politik yang muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan ekologis. Ketika masyarakat dan LSM membentuk jaringan advokasi untuk menuntut hak atas tanah dan akses sumber daya, mereka sesungguhnya sedang mempraktikkan politik lingkungan dalam bentuknya yang paling konkret: perjuangan untuk keadilan ekologis dan sosial.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menuntut perubahan paradigma dari sekadar konservasi teknokratis menuju pendekatan partisipatif dan berkeadilan sosial. Negara perlu membuka ruang dialog dan kolaborasi sejati antara pemerintah, masyarakat, dan aktor non-negara agar tercipta tata kelola lingkungan yang inklusif. Ekologi politik bukan hanya tentang memahami konflik, tetapi juga tentang bagaimana membangun transformasi sosial-ekologis melalui perubahan kebijakan dan struktur kekuasaan.

Dengan demikian, pengalaman konflik Dongi-dongi bukan hanya cermin dari kegagalan kebijakan konservasi, tetapi juga pelajaran penting tentang perlunya reorientasi politik lingkungan di Indonesia dari yang berorientasi pada kontrol negara menjadi yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan keadilan ekologis. Integrasi nilai-nilai partisipasi, solidaritas sosial, dan pengakuan terhadap pengetahuan lokal menjadi dasar menuju pengelolaan sumber daya yang lebih adil, lestari, dan manusiawi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwibowo, S. (2008). *Akses dan kontrol sumber daya alam di kawasan konservasi: Studi kasus konflik perebutan hutan Dongi-dongi, Taman Nasional Lore Lindu*. Bogor: IPB Press.
- Agrawal, A. (2005). *Environmentality: Technologies of government and the making of subjects*. Durham, NC: Duke University Press
- Bassett, T. J. (1988). The political ecology of peasant–herder conflicts in the northern Ivory Coast. *Annals of the Association of American Geographers*, 78(3), 453–472.
- Blaikie, P. (1985). *The political economy of soil erosion in developing countries*. London: Longman.
- Blaikie, P., & Brookfield, H. (1987). *Land degradation and society*. London: Methuen.
- Bryant, R. L. (1998). Power, knowledge and political ecology in the third world: A review. *Progress in Physical Geography*, 22(1), 79–94.
- Bryant, R. L., & Bailey, S. (1997). *Third world political ecology*. London: Routledge.
- Carter, N. (2007). *The politics of the environment: Ideas, activism, policy* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Escobar, A. (1999). After nature: Steps to an antiessentialist political ecology. *Current Anthropology*, 40(1), 1–30.
- Leff, E. (n.d.). *Political ecology: A Latin American perspective*. Mexico City: UNAM.
- Li, T. M. (2014). *Land's end: Capitalist relations on an indigenous frontier*. Durham, NC: Duke University Press.
- Neumann, R. P. (2005). *Making political ecology*. London: Hodder Arnold.
- Peet, R., & Watts, M. (1996). *Liberation ecologies: Environment, development, social movements*. London: Routledge.
- Peluso, N. L. (1992). *Rich forests, poor people: Resource control and resistance in Java*. Berkeley: University of California Press.
- Perreault, T., Bridge, G., & McCarthy, J. (Eds.). (2015). *The Routledge handbook of political ecology*. London: Routledge.
- Robbins, P. (2004). *Political ecology: A critical introduction*. Malden, MA: Blackwell.
- Robbins, P. (2012). *Political ecology: A critical introduction* (2nd ed.). Malden, MA: Wiley-Blackwell.
- Rocheleau, D., Thomas-Slayter, B., & Wangari, E. (1996). *Feminist political ecology: Global issues and local experiences*. London: Routledge.
- Schlosberg, D. (2007). *Defining environmental justice: Theories, movements, and nature*. Oxford: Oxford University Press.
- Watts, M. (2000). Political ecology. In E. Sheppard & T. J. Barnes (Eds.), *A companion to economic geography* (pp. 257–274). Oxford: Blackwell.

Wolford, W., & Keene, S. (2015). Social movements. In T. Perreault, G. Bridge, & J. McCarthy (Eds.), *The Routledge handbook of political ecology* (pp. 303–315). London: Routledge.

